

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah hunian atau tempat tinggal yang mempunyai peran yang sangat penting. Hunian tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh tapi juga mempunyai fungsi yang lebih luas sebagai sarana peningkatan kualitas dan pembinaan keluarga, pusat pendidikan keluarga, serta banyak lagi fungsi lainnya. permasalahan perumahan dan permukiman yang tidak boleh hanya dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan ekologi.

Pada intinya kemiskinanlah yang menjadi penyebab yang sangat mendasar disamping penyebab lain. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa dari 25,53 persen rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni memiliki pengeluaran 20 persen dibawah garis kemiskinan dan 20,79 persen lagi memiliki pengeluaran 10 persen dibawah garis kemiskinan (BPS Depkesos 2001).

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang akan sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya, namun apabila hal tersebut malah sebaliknya maka akan menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa desa Ambara merupakan desa yang tergolong dalam kategori mula, kondisi desa yang masih dalam taraf perkembangan membuat kondisi desa masih dalam kategori mula. akan tetapi kondisi dan aktivitas ekonomi, keberadaan sarana dan prasarana, perilaku kedaulatan politik yang aktif, keberadaan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara menyeluruh, serta kinerja

pemerintahan yang memadai di seluruh aspek terkait pengembangan potensi desa yang dimiliki akan mampu membuat desa ini kedepan akan lebih berkembang lagi.

Aparatur desa tidak serta-merta membiarkan kemiskinan semakin menyebar, berbagai program dan bantuan untuk mengentaskan telah diupayakan yaitu salah satunya program Kelompok Tani yang mengupayakan agar masyarakat dapat bercocok tanam jagung, kacang-kacangan, dan padi sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian program pemerintah yang pernah terealisasi yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah terselenggara pada tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian yang saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah program RTLH 2017, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diselenggarakan pada tahun 2018 kemarin. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya berupa pembangunan baru dan peningkatan kualitas, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) perumahan swadaya masing-masing sebanyak 50.000 unit. Program pembangunan layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

Kegiatan BSPS tahun 2018 mengacu pada PERMEN No:07/PRT/M/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pelaksanaan BSPS tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar 3,2 triliun yang akan menyentuh 180 ribu unit rumah tidak layak huni. Program ini dilaksanakan pada 32 Provinsi dan 209 kabupaten/kota. Program ini

dilakukan secara terus-menerus oleh Pusat Pengembangan Perumahan (P2P) dan Kementerian Perumahan Rakyat guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni.

Menurut hasil observasi yang diamati di lapangan, penyimpangan prosedur pendataan yang dilakukan oleh panitia yaitu kesalahan dalam mendata kepala keluarga yang berhak menerima, yang seharusnya tidak berhak mendapatkan akan tetapi didata sebagai penerima bantuan. Selain itu, praktik kolusi terjadi pada proses pendataan. Kemudian dari 4 dusun yang ada di desa ambara, tidak merata dalam pendataan dari 30 unit rumah yang di peroleh . Para aparat desa pun tidak diikutsertakan dalam proses pendataan seperti halnya dari aparat yang terendah seperti Rukun Tetangga (RT) tidak mengetahui mengenai bagaimana prosedur serta proses penyaluran dana BSPS, sehingga pada saat ketua RT ditanyai oleh warga beliau tidak bisa menjawab.

Penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo dilakukan secara 3 tahapan yang sebelumnya dilakukan pendataan kepada Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima dengan syarat yang telah ditentukan pada bulan maret 2018 yang dilakukan oleh Tenaga Pasilitator Lapangan (TPL). Pada tahun 2018 jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo sebanyak 491 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah kepala keluarga (KK) Desa Ambara Kecamatan dungaliyo kabupaten gorontalo

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga (KK)
1	Pendain	152 KK
2	Harapan Timur	97 KK
3	Harapan Barat	139 KK
4	Bukittinggi	104 KK
JUMLAH		491 KK

Sumber : Data Primer Desa Ambara 2018

Menurut jumlah data kepala keluarga tersebut, yang mendapat dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah sebanyak 30 kepala keluarga (KK) dengan kegiatan pembangunan peningkatan kualitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Ambara kecamatan dungaliyo kabupaten gorontalo

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Pendain	14 KK
2	Harapan Timur	4 KK
3	Harapan Barat	5 KK
4	Bukittinggi	7 KK
Total		30 KK

Sumber : Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2018

Sebagian besar kepala keluarga (KK) yang mendapat dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo adalah bermata pencaharian sebagai buruh tani. Salah seorang kepala keluarga (KK) yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berpendapat bahwa “pemberian dana Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam membangun rumah mereka, mereka harus menambah biaya dalam menyelesaikan pembangunan karena bahan material saat ini naik. Selain itu, ada beberapa kepala keluarga (KK) yang telah di data tetapi tidak mampu berswadaya sehingga pemerintah desa membatalkan dan mengalihkan kepada keluarga yang mampu berswadaya.

Pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini, pemerintah memberikan bantuan pada masing-masing daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang menjadi sasaran kompensasi atau sekitar Rp. 450.000.000, dengan rincian 30 unit peningkatan kualitas untuk Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.
2. Sistem pendataan kepala keluarga (KK) yang berhak menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.
3. Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan penyaluran dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi pada “Persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka perumusan masalah di atas adalah “Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo”.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

menjelaskan persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku, sikap, moral, dan etika yang terkait dengan konsep-konsep ilmu Sipil yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis berguna untuk:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat guna meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat yang berhak menerima.
2. Sebagai tolak ukur untuk menambah wawasan ilmu tentang program pemerintah terutama yang berkaitan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.
3. Sebagai mahasiswa sipil, hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan pembelajaran sebagai tenaga penyuluh lapangan (TPL) dalam pekerjaan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu sipil karena berkaitan dengan sikap, nilai, dan moral masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dimana setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah penelitian dilakukan setelah terbitnya surat izin penelitian dari FATEK dan selama berlakunya surat izin penelitian.